

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Pemutakhiran Data Keluarga: Tingkat Kesejahteraan Keluarga*. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (2020). *Statistik Daerah Kabupaten Muara Enim 2020*.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. (n.d.). *Distribusi PDRB ADHB per Sub Kategori (Persen), 2020-2021*. <https://sumsel.bps.go.id/indicator/100/744/1/distribusi-pdrb-adhb-per-sub-kategori.html>
- Diansari, R. E. (2017). Analisis Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 950–960. <https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/1007>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Portal data*.
- Fatima, Y. C. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Hanik, U., & Sugiantoro, H. (2010). *Monitoring & Evaluasi Sebagai Konsensus Untuk Mencapai Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri*. 1, 1(November), 132–162. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/15/5>
- Independent Evaluation Group. (n.d.). *What is Monitoring and Evaluation?* <https://ieg.worldbankgroup.org/what-monitoring-and-evaluation>
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2002). Handbook for Monitoring and Evaluation. *Evaluation, October*, 1–163. [https://www.measureevaluation.org/resources/training/capacity-building-resources/basic-me-concepts-portuguese/IFRC_Monitoring and Evaluation handbook.pdf](https://www.measureevaluation.org/resources/training/capacity-building-resources/basic-me-concepts-portuguese/IFRC_Monitoring_and_Evaluation_handbook.pdf)
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang*

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.* Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.* Jakarta.

Kementerian Sosial. (n.d.). *Program Keluarga Harapan.*
<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1&msclkid=05b2b678cdb311eca99fa3143669ad9e>

Knowlton, L. W. and C. P. (2009). The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results. In *East*.

Luh, N., Rita, P., & Budiana, I. N. (2020). *Menguji Taji Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Test the Spurs of Implementation of the Policy for Providing Grant Assistance to Community Groups in Badung Regency.* 9(1), 100–110.

Manane, D. R. (2019). *Analisis Dana Hibah Program Desa / Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pada Desa Naunu).* 4(2), 11–27.

Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Ngindana, R., & Hanafi, I. (2012). *APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabaikan* (pp. 37–34). UB Press.

OECD. (2011). Section 10: Monitoring and Evaluation. In *The OECD DAC Handbook on Security System Reform.*
<https://doi.org/10.1787/9789264027862-13-en>

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.* Muara Enim.

- Pemerintah Muara Enim. (2016). *Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan*. Muara Enim.
- Pemerintah Muara Enim. (2020). *Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Muara Enim.
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2018). *Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim*.
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2020). *Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2020). *Laporan Monitoring Evaluasi Hibah APBD Dinas Perkebunan Tahun 2020*.
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2020). *Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Priyono, N. (2010). *Analisis Faktor- Faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010)*. 13–26.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 1, 434.
- Rindawati, S. (2021). *Responsibilitas Pengelolaan APBD* (p. 84).
- Rismahayani. (2018). Analisis Hukum Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 135–149.

<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1432>

- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Suastra, I. K. (2017). Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2016. *Citizen Charter*, 1(1), 1–11.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- W.K. Kellogg Foundation. (2004). *Logic Model Development Guide*.